

**Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal terhadap Kinerja
Keuangan Pemerintah Daerah di Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2009-2019**

SKRIPSI



Disusun Oleh :

Kezia Kusumawati Tipawael

12160058

*Acc. ujian
4/6 '20 20*

FAKULTAS BISNIS PROGRAM STUDI AKUNTANSI

UNIVERSITAS KRISTEN DUTA WACANA

YOGYAKARTA

2020

HALAMAN PENGAJUAN SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Bisnis Program Studi Akuntansi

Universitas Kristen Duta Wacana Yogyakarta

Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi

Disusun Oleh :

Kezia Kusumawati Tipawael

12160058

FAKULTAS BISNIS PROGRAM STUDI AKUNTANSI

UNIVERSITAS KRISTEN DUTA WACANA

YOGYAKARTA

2020

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
SKRIPSI/TESIS/DISERTASILUNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas **akademika** Universitas Kristen Duta Wacana, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Kezia Kusumawati Tipawael
NIM : 12160058
Program studi : Akuntansi
Fakultas : Bisnis
Jenis Karya : Skripsi

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Kristen Duta Wacana **Hak Bebas Royalti Noneksklusif** (*None-exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

“PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN BELANJA MODAL TERHADAP KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH DI KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN TAHUN 2009-2019”

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti/Noneksklusif ini Universitas Kristen Duta Wacana berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama kami sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Yogyakarta
Pada Tanggal : 16 Juli 2020

Yang menyatakan



(Kezia Kusumawati Tipawael)

12160058

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi dengan judul:

**“PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN BELANJA MODAL TERHADAP
KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH DI KABUPATEN KEPULAUAN
YAPEN TAHUN 2009-2019”**

telah diajukan dan dipertahankan oleh:

KEZIA KUSUMAWATI TIPAWAEL

12160058

dalam Ujian Skripsi Program Studi Akuntansi

Fakultas Bisnis

Universitas Kristen Duta Wacana

dan dinyatakan DITERIMA untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana
Akuntansi pada tanggal 25 Juni 2020

Nama Dosen

Tanda Tangan

1. Dra. Putriana Kristanti, MM., Akt, CA
(Ketua Tim Penguji/Dosen Pembimbing)
2. Eka Adhi Wibowo, SE, M.Sc
(Dosen Penguji)
3. Frista SH, SE, M.S.Ak
(Dosen Penguji)



Yogyakarta, 06 Juli 2020

Disahkan Oleh

Dekan Fakultas Bisnis

Ketua Program Studi Akuntansi



Dr. Perminas Pangeran, SE., M. Si.



Christine Novita Dewi, SE., MAcc., Ak., CA., CMA., CPA.

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya Menyatakan bahwa sesungguhnya skripsi dengan judul
**Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan
Pemerintah Daerah di Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2009-2019**

Skripsi yang saya kerjakan untuk melengkapi sebagian syarat untuk menjadi Sarjana dalam Program Studi Akuntansi Fakultas Bisnis Universitas Kristen Duta Wacana Yogyakarta, adalah bukan hasil tiruan atau duplikasi dari karya pihak Perguruan Tinggi atau instansi manapun, kecuali bagian yang informasinya sudah Dicantumkan sebagaimana mestinya.

Jika dikemudian hari didapati bahwa hasil skripsi ini adalah plagiasi atau tiruan dari karya pihak lain, maka saya bersedia dikenai sanksi yakni pencabutan gelar sarjana saya.

Yogyakarta, 04 Juni 2020



Kezia Kusumawati Tipawael (12160058)

MOTTO

- **Yeremia 29:11**

Sebab Aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada pada-Ku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan.

- **Papa**

Jangan pernah takut gagal sebelum mencoba, tetap berusaha dan berdoa.

- **Mama**

Tetap mengandalkan Tuhan Yesus yang berarti berharap dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan jangan memakai kekuatan sendiri.

- **Onesiforus**

Jangan pernah takut melakukan hal yang baru, karena kalau tidak mencoba kita tidak akan pernah tau apa yang terjadi di kemudian hari dalam hidup.

- **Merry Riana**

Hidup adalah perjuangan yang harus dimenangkan, tantangan yang harus dihadapi, Anugerah Tuhan yang harus di syukuri.

HALAMAN PERSEMBAHAN

1. Terima kasih kepada Tuhan Yesus yang telah menyertai saya selama menempuh Pendidikan di kota Yogyakarta.
2. Terima kasih kepada Ibu Dra. Putriana Kristanti, MM., Akt, CA. Selaku dosen pembimbing yang telah membimbing dan memotivasi saya dalam menyelesaikan tugas akhir saya.
3. Terima kasih kepada seluruh Dosen dan Staf Fakultas Bisnis Universitas Kristen Duta Wacana atas ilmu yang telah saya terima selama menempuh pendidikan di kampus serta dukungan moral yang begitu baik kepada saya dalam menyelesaikan kuliah saya.
4. Terima kasih kepada Papa, Mama, Kakak Ones dan seluruh keluarga besar yang selalu mendukung, menolong serta memotivasi saya setiap saat.
5. Terima kasih kepada Badan Keuangan Pendapatan Daerah Kab. Kepulauan Yapen yang telah membantu saya dalam melengkapi skripsi saya.
6. Terima kasih kepada keluarga saya dari zaman SMA yaitu Intan, Stevano, Stevani, Hulda, Egi dan Jimmy yang selalu memotivasi saya disaat saya kelelahan.
8. Terima kasih kepada sahabat sekaligus keluarga angkat saya selama di Yogyakarta yaitu Demar, naomi dan jull ada buat saya kapanpun itu saya butuh mereka.
9. Terima kasih kepada keluarga rohani saya yaitu Kakak elin, GBI Generasi Baru, Cell Grup God's will dan Pam Gki Kapernaum.
10. Terima kasih kepada keluarga besar Akuntansi 2016.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus yang senantiasa Melimpahkan kasih karunia dan rahmat-NYA sehingga dapat menyelesaikan skripsi berjudul **Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Kabupaten Kepulauan Yapen**. Adapun skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Srata 1 pada program Sarjana Fakultas Bisnis Universitas Kristen Duta Wacana.

Penyusun menyadari bahwa skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan dan jauh dari kesempurnaan karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman, oleh karena itu kritik dan saran sangat diharapkan. Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak yang telah membantu dan semoga Tuhan Yesus Senantiasa Memberkati.

Yogyakarta, 4 Juni 2020

Kezia Kusumawati Tipawael

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGAJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR.....	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
ABSTRAK.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 LATAR BELAKANG MASALAH	1
1.2 RUMUSAN MASALAH	5
1.3 TUJUAN PENELITIAN	5
1.4 KONTRIBUSI	5
1.5 INDIKATOR KEBERHASILAN.....	6
1.6 KETERBATASAN.....	6
BAB II LANDASAN TEORI DAN STUDI PUSTAKA	7
2.1 Landasan Teori	7
2.1.1 Pendapatan Asli Daerah	7
2.1.2 Belanja Modal.....	11
2.1.3 Rasio-rasio Kinerja Keuangan Daerah.....	11
2.2 Studi Pustaka dan Penelitian Terdahulu.....	17
2.3 Pengembangan Hiipotesis	22
BAB III METODE PENELITIAN	24
3.1 Deskripsi Kabupaten Kepulauan Yapen	24
3.1.1 Gambaran Umum Kabupaten Kepulauan Yapen.....	24
3.1.2 Landasan Hukum, Visi dan Misi.....	26
3.1.3 Organisasi Perangkat Daerah.....	30
3.2 Data-data yang di perlukan.....	32
3.3 Desain Penelitian	32
3.3.1 Jenis Penelitian.....	32
3.3.2 Tempat dan Waktu Penelitian.....	32
3.3.3 Subjek dan Objek Penelitian.....	32
3.3.4 Sumber Data	32
3.3.5 Kerangka Pemikiran.....	33
3.4 Metode Pengumpulan Data	33
3.4.1 Metode pengumpulan data.....	33
3.4.2 Analisis Penelitian.....	34
3.4.3 Teknik Analisis Data.....	35
BAB IV HASIL PENELITIAN.....	39

4.1 Hasil Penelitian	39
4.1.1 Derajat Desentralisasi	39
4.1.2 Rasio Kemandirian Keuangan Daerah	42
4.1.3 Rasio Efektivitas PAD	45
4.1.4 Rasio Efisiensi PAD	48
4.1.5 Rasio Keserasian	51
4.1.6 Rasio Pertumbuhan	57
4.1.7 Statistik Deskriptif	64
4.2 Pembahasan	68
BAB V REKOMENDASI.....	72
DAFTAR PUSTAKA.....	74
LAMPIRAN	75

©UKDW

DAFTAR TABEL

1. 1 pola Hubungan Kemandirian dan Kemampuan Daerah
2. 2 Tingkat Efektivitas PAD
3. 3 Kriteria Efisiensi
4. 2.1 Penelitian Terdahulu
5. 4.1 Perhitungan Rasio Derajat Desentralisasi BKPD Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun Anggaran 2009-2019
6. 4.2 Perhitungan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah BKPD Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun Anggaran 2009-2019
7. 4.3 Perhitungan Rasio Efektivitas PAD BKPD Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun Anggaran 2009-2019
8. 4.4 Perhitungan Rasio Efisiensi PAD BKPD Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun Anggaran 2009-2019
9. 4.5 Perhitungan Rasio Keserasian Belanja Operasi BKPD Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun Anggaran 2009-2019
10. 4.5 Perhitungan Rasio Keserasian Belanja Modal BKPD Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun Anggaran 2009-2019.
11. 4.6 Perhitungan Rasio Pertumbuhan Perhitungan Rasio Pertumbuhan Pendapatan BKPD Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun Anggaran 2009-2019.
12. 4.6 Perhitungan Rasio Pertumbuhan Perhitungan Rasio Pertumbuhan Belanja BKPD Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun Anggaran 2009-2019.
13. 4.3 Hasil Penelitian

DAFTAR GAMBAR

1. 3.1 Peta Kabupaten Kepulauan Yapen Papua

©UKDW

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Persetujuan Penelitian
2. Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2009
3. Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2010
4. Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2011
5. Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2012
6. Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2013
7. Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2014
8. Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2015
9. Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2016
10. Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2017
11. Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2018
12. Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2019
13. Kartu Konsul

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui signifikansi pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Kepulauan Yapen Papua.

Kinerja keuangan pemerintah daerah merupakan cerminan keberhasilan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah. Dalam menentukan dan mengukur kinerja keuangan daerah dibutuhkan laporan realisasi anggaran pemerintah daerah dengan menggunakan alat ukur yang digunakan dalam mengukur kinerja keuangan daerah adalah Sampel alat analisis. Rasio yang digunakan yaitu *Rasio Derajat Desentralisasi*, *Rasio kemandirian keuangan daerah*, *Rasio efisiensi PAD*, *Rasio efektivitas PAD*, *Rasio Keserasian* dan *Rasio Pertumbuhan*.

Dari hasil Penelitian yang telah dilakukan menunjukkan Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan terhadap Rasio Derajat Desentralisasi, Rasio Keserasian, Rasio Pertumbuhan (belanja) dan Rasio Kemandirian. Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh terhadap Rasio Efektivitas PAD, Rasio Efisiensi PAD dan Rasio Pertumbuhan (pendapatan). Belanja Modal berpengaruh signifikan terhadap Rasio Keserasian (belanja) dan Rasio Pertumbuhan (belanja). Belanja Modal tidak berpengaruh terhadap Rasio Derajat Desentralisasi, Rasio Kemandirian, Rasio Efektivitas PAD, dan Rasio Efisiensi PAD.

Kata Kunci: Belanja Modal, Kinerja keuangan pemerintah daerah, Kabupaten Kepulauan Yapen, Pendapatan asli daerah.

ABSTRACT

This study aims to determine the significance of the effect of Regional Original Revenue and Capital Expenditures on Regional Government Financial Performance. This research was conducted in the Yapen Islands Regency, Papua.

The financial performance of local governments is a reflection of the success of local governments in managing regional finances. In determining and measure the local government's performance need a realization local government's budget by using a tool to determine and measure the performance of the local government's financial, called the analysis tool's sample. The ratios used are Decentralization Degree Ratio, Regional financial independence ratio, PAD efficiency ratio, PAD effectiveness ratio, Harmony Ratio, and Growth Ratio.

The results of the research showed that the Regional Original Revenue significantly influences the Decentralization Degree Ratio, Harmony Ratio, Growth Ratio (expenditure) and Independence Ratio. Local Own Revenue does not affect the PAD Effectiveness Ratio, PAD Efficiency Ratio, and Growth (revenue) Ratio. Capital Expenditures have a significant effect on the Harmony Ratio (expenditure), and Growth Ratio (expenditure). Capital expenditure does not affect the Decentralization Degree Ratio, Independence Ratio, PAD Effectiveness Ratio, and PAD Efficiency Ratio.

Keywords: Capital Expenditures, Local government financial performance, Yapen Islands Regency, Local own revenue.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia memiliki berbagai wilayah yang di tempati oleh masyarakat yang akan berfungsi untuk bertanggungjawab terhadap kepentingan yang ada di negara Indonesia. Negara memiliki Lembaga pemerintahan yang berperan untuk dapat meningkatkan pelayanan guna memfasilitasi kepentingan masyarakat yang secara tidak langsung memiliki dampak terhadap kesejahteraan masyarakat yang akan dicapai dengan cara mengelola keuangan pemerintah dengan baik. Pelayanan kepada masyarakat harus berkaitan erat dengan penerapan kebijakan otonomi pada suatu daerah.

Otonomi Daerah bertujuan untuk melihat pertumbuhan ekonomi dan pembangunan suatu daerah. Selain itu, Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan juga kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri pemerintahan dan kepentingan masyarakat agar terciptanya daerah yang mandiri dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengertian ini berdasarkan landasan hukum Undang-undang No.32 Tahun 2004 tentang pemerintah Daerah dan Undang-undang No.33 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik agar lebih baik maka potensi, karakteristik dan kebutuhan masyarakat di daerah menjadi hal yang penting agar mengurangi kesenjangan yang terjadi terhadap masyarakat. Untuk itu pemerintah daerah Bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) akan menentukan kebijakan umum yaitu tentang Anggaran Asli Daerah (APBD) agar

sebagai pedoman dalam pengalokasian sumber Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah.

Pendapatan Asli Daerah menurut Undang-undang Republik Indonesia No. 33 Tahun 2004 pasal 3 ayat 1 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pendapatan Asli Daerah bertujuan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk menandai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai Desentralisasi. Pendapatan Asli Daerah menurut Undang-undang No. 33 Tahun 2004 pasal 6 ayat 1 dan 2 menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang berasal dari ayat (1) Pendapatan Asli Daerah bersumber dari (a) Pajak daerah (b) Retribusi Daerah (c) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan (d) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. ayat (2) Lain-lain Pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana di maksud pada ayat (1) huruf (d) meliputi: (a) Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan (b) Jasa giro (c) Pendapatan bunga (d) Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing dan (e) Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah. Dalam upaya meningkatkan Pendapatan asli daerah, daerah dilarang a) Menetapkan peraturan daerah tentang pendapatan yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi; dan (b) Menetapkan peraturan daerah tentang pendapatan yang menghambat mobilitas penduduk, lalu lintas barang dan jasa antar daerah, dan kegiatan impor/eksport.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) harus dirancang berdasarkan kebutuhan pembangunan daerah, tidak bertentangan dengan kepentingan umum, kepentingan nasional, dan kepentingan pemda tetangga (pemda lain) sehingga mampu merangkul dan melibatkan masyarakat setempat, sesuai situasi kondisi domestik setempat. Selain itu keuangan pemerintah daerah harus berdasarkan peraturan daerah. APBD dapat menjadi salah satu sarana komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakat mengenai prioritas pengalokasian yang dilakukan oleh pemerintah daerah setelah berkoordinasi dengan pihak legislatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Kinerja Keuangan pemerintah daerah merupakan salah satu tingkat untuk mencapai target yang baik dalam keuangan pemerintah daerah, selain itu dapat membantu dalam memperbaiki kinerja keuangan pemerintah daerah dan mewujudkan pertanggungjawaban kepada masyarakat daerah agar lebih transparan dalam menginformasikan keuangan pemerintah daerah agar lebih baik lagi daritahun ke tahun. Kinerja keuangan pemerintah daerah adalah tingkat pencapaian dari suatu hasil kerja di bidang keuangan daerah yang meliputi penerimaan dan belanja daerah dengan menggunakan sistem keuangan yang ditentukan melalui suatu kebijakan atau ketentuan melalui suatu kebijakan atau ketentuan perundang-undangan selama satu periode anggaran. Bentuk dari pengukuran kinerja tersebut berupa rasio keuangan yang terbentuk dari sistem laporan pertanggungjawaban daerah berupa perhitungan APBD. Peneliti ingin melakukan Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2009-2019. Dengan menggunakan alat ukur melalui indikator-indikator keuangan yaitu ada enam yaitu Derajat Desentralisasi,

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Efektivitas PAD, Rasio Efisiensi PAD Rasio Kesorasian dan Rasio Pertumbuhan (*Growth Ratio*).

Dalam Peraturan Pemerintah No. 105/2000 dikemukakan asas umum pengelolaan keuangan daerah yang meliputi:

- a. Pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku efisien, efektif dan bertanggung jawab.
- b. Semua penerimaan daerah dan pengeluaran daerah dicatat dalam APBD, perubahan APBD dan perhitungan APBD.
- c. Daerah dapat membentuk dana cadangan.
- d. Daerah dapat mencari sumber-sumber pembiayaan lainnya, selain sumber pembiayaan yang telah ditetapkan seperti kerja sama dengan pihak lain.
- e. Pokok-pokok pengelolaan Keuangan Daerah diatur dalam Peraturan daerah oleh APBD disusun dengan pendekatan kinerja. Peraturan pemerintah tersebut sudah memberikan arahan secara umum kepada pemerintah daerah dalam menyusun dan melaksanakan APBD. Disamping itu, daerah dituntut lebih terampil dalam proses penyusunan maupun dalam pelaksanaan APBD dengan menggunakan pendekatan kinerja. Anggaran dengan pendekatan kinerja merupakan suatu sistem anggaran yang mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja atau output dari perencanaan alokasi biaya input yang ditetapkan (Penjelasan PP No. 105/2000). Hal ini juga berarti bahwa hal yang dicapai harus sepadan atau lebih besar dari biaya yang dikeluarkan. Disamping itu, setiap penganggaran dalam pos pengeluaran APBD harus didukung oleh adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup. Penyelenggaraan keuangan daerah akan berjalan dengan baik dan optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintah

diikuti dengan pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada daerah. Besarnya alokasi sumber-sumber penerimaan daerah tersebut disesuaikan dengan pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta mengacu pada Undang-undang tentang Perimbangan Keuangan antarpemerintah pusat dan pemerintah daerah. Semua sumber-sumber keuangan yang melekat pada setiap urusan yang diserahkan kepada pemerintah daerah menjadi sumber keuangan daerah (Penjelasan Umum UU No. 32 Tahun 2004)

1.2 Rumusan Masalah

Apakah pengaruh pendapatan asli daerah dan belanja modal berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Yapen pada Tahun 2009-2019?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pendapatan asli daerah dan belanja modal terhadap kinerja keuangan yang terjadi di dalam pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2009-2019.

1.4 Kontribusi Penelitian

Manfaat penelitian merupakan dampak untuk mencapai suatu tujuan. Berdasarkan tujuan penelitian di atas maka, manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Bagi Universitas

Hasil Penelitian ini dapat menambah referensi perpustakaan Universitas Kristen Duta wacana.

b. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menjadikan tolak ukur kinerja dalam pemerintah daerah untuk menjadi lebih baik, sehingga nantinya akan meningkatkan kualitas dalam menjalankan kinerja di pemerintahan daerah.

c. Bagi Peneliti

Penelitian ini dapat menambah pengetahuan bagi peneliti bagaimana pengaruh pendapatan asli daerah (PAD) dan belanja modal terhadap kinerja laporan keuangan. Selain itu juga dapat meningkatkan pemahaman peneliti dalam bidang akademik.

1.5 Indikator Keberhasilan

Indikator keberhasilan di Kabupaten Kepulauan Yapen yaitu:

1. Pendapatan asli daerah di Kabupaten Kepulauan Yapen saat ini melakukan pemungutan pajak daerah seperti pemungutan pajak hotel, pajak restaurant, dan pajak penerangan jalan. tata cara pemungutan spt kepada wajib pajak dengan membayar ke bank papua dan wajib pajak akan menerima surat dari bank.
2. Penyusunan APBD di Kabupaten Kepulauan Yapen sudah menggunakan aplikasi simpada sehingga memudahkan para pegawai untuk menyusun Laporan Keuangan Daerah.

1.6 Keterbatasan

Penelitian ini hanya dilakukan untuk melihat pengaruh pendapatan asli daerah dan belanja modal terhadap kinerja keuangan yang terjadi di dalam pemerintah daerah yaitu dengan mengacu pada laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja modal (APBD) yang akan di teliti. Penelitian ini mengacu pada daerah Kabupaten Kepulauan Yapen, sehingga rekomendasi yang dari peneliti hanya berlaku untuk Kabupaten Kepulauan Yapen.

BAB V

REKOMENDASI

Berdasarkan hasil yang telah dipaparkan, maka penulis mengajukan rekomendasi agar dapat dipertimbangkan untuk meningkatkan Kinerja Keuangan Pemerintah daerah Kabupaeten Kepulauan Yapen yaitu:

1. Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen diharapkan lebih meningkatkan Kinerja Keuangan yang terjadi di dalam daerah, agar nantinya mampu mewujudkan kinerja keuangan yang lebih baik lagi kedepannya. Pemerintah daerah dapat menggunakan rasio-rasio yang terdapat dalam kinerja keuangan pemerintah daerah yang gunanya yaitu untuk mengontrol kinerja yang lebih maksimal.
2. Kepala Dinas, Kepala Bidang Akuntansi dan Kepala Bidang Pendapatan Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen dapat memaksimalkan pendapatan asli daerah dan belanja modal yaitu dengan cermat, seperti pendapatan asli daerah yang bisa di jadikan sebagai sumber-sumber pendapatan daerah dan belanja modal dalam pengeluaran yang digunakan harus lebih di kondisikan dengan keadaan yang terjadi di daerah.
3. Penulis menemukan Pengaruh Pendapatan dan Belanja Modal yang tidak berpengaruh terhadap Rasio Efektivitas. Di sini menunjukkan kurangnya peran Rasio Efektivitas yang menunjukkan tingkat keberhasilan dari daerah dengan tujuan yang hendak dicapai, penulis mengusulkan untuk daerah menetapkan SOP atau *Standard Operational Procedure* merupakan salah satu cara untuk meningkatkan efektivitas kerja pegawai. Agar dapat dijadikan acuan untuk pegawai melakukan pekerjaan, apa saja yang harus dicapai dan ketentuan timeline kerja. Tetapkan tujuan dan target yang jelas, realistis dan dapat di capai. Hal ini akan dapat membuat pegawai mengerjakan pekerjaannya terarah di bandingkan sebelumnya. Agar

kemampuan pemerintah daerah dalam memobilisasi penerimaan PAD sesuai dengan yang ditargetkan.

4. Penulis juga menemukan Pengaruh Pendapatan dan Belanja Modal yang tidak berpengaruh terhadap Rasio Efisiensi. Kurangnya rasio efisiensi untuk membandingkan biaya yang dikeluarkan pemerintah daerah untuk memperoleh PAD. Penulis memberikan saran kepada pemerintah daerah sebaiknya meningkatkan rasio efisiensi salah satu rasio yang memiliki peran yang cukup penting, untuk itu pemerintah daerah perlu menghitung secara cermat berapa besarnya biaya yang akan dikeluarkan untuk merealisasikan seluruh pendapatan yang diterima oleh daerah sehingga dapat diketahui apakah kegiatan pemungutan pendapatannya tersebut efisien atau tidak. Hal itu perlu dilakukan karena meskipun pemerintah daerah berhasil merealisasikan penerimaan pendapatan sesuai dengan target yang ditetapkan, namun keberhasilan itu tidak cukup karena kurang memiliki arti apabila ternyata biaya yang dikeluarkan untuk merealisasikan target penerimaan pendapatannya itu lebih besar dari pada realisasi pendapatan yang diterimanya.

Berdasarkan hasil penelitian dan rekomendasi diatas maka penelitian ini memiliki keterbatasan penelitian yaitu ketika melakukan uji dengan menggunakan Logaritma Natural maka hasil uji regresi linear berganda tidak memiliki pengaruh antara pendapatan asli daerah dan belanja modal terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Bagi peneliti selanjutnya, saran yang dapat diberikan adalah diharapkan untuk menggunakan variabel indikator keberhasilan lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Antari dan Sedana. 2018. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *E-Jurnal Manajemen Unud*. 7 (2): 1080-1110
- Andirfa, Basri, dan Majid. 2016. Pengaruh Belanja Modal, Dana Perimbangan dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Kinerja Keuangan Propinsi Aceh, Indonesia. *Jurnal Magister Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala*. 5 (3): 30-38.
- Mambrasar, C. Laporan Realisasi Anggaran. Dinas Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah, Kabupaten Kepulauan Yapen 2009 s.d. 2019, Papua.
- Fatmawasti dan Pratiwi. 2019. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Cimahi. *Jurnal Akuntansi* 12 (2): 62-69.
- Ghozali, I. 2018. Analisis Multivariat dan Ekonometrika Teori, Konsep dan Aplikasi dengan Eviews 10, Edisi dua; Universitas Diponegoro Semarang.
- Halim. 2007. Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta: Salemba Empat.
- Mahmudi. 2019. Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Edisi Keempat Yogyakarta: UPP STIM YKPN
- Nurhadi. Susunan Perangkat Daerah. Badan Perencanaan Daerah (BAPEDA), Kabupaten Kepulauan Yapen, Papua.
- Sijabat, Saleh dan Wachid. 2013. Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Serta Kemampuan Keuangan Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah (Studi Kasus Pada Dinas Pendapatan Daerah dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang Tahun 2008-2012). *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*. 2 (2): 236-242
- Sony. Laporan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan. Sekertaris Daerah, Kabupaten Kepulauan Yapen. Papua.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
<http://www.jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2004/33TAHUN2004UU.htm>
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
<http://www.jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/2004/32tahun2004uu.htm>
- Wenny,C.D.(2012). Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Kinerja Keuangan pada Pemerintah Kabupaten dan Kota di Propinsi Sumatera Selatan, Indonesia. *Forum Bisnis Dan Kewirausahaan Jurnal Ilmiah STIE MDP*. 12 (1): 39-5.